



RENCANA KERJA (RENJA) 2026

**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN PONGGOK**



(0342) 551003



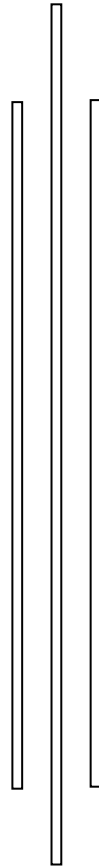
KEC.PONGGOK@BLITARKAB.GO.ID



WWW.KEC-PONGGOK.BLIARKAB.GO.ID



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR



RENJA TAHUN 2026
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
KECAMATAN PONGGOK

KATA PENGANTAR

Puji Syukur berkat rahmat Allah SWT, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Ponggok Tahun 2026 telah dapat diselesaikan. Rankhir Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Tahun 2024 merupakan bahan materi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar yang disusun dengan mengacu pada tema, prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur serta isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2025-2029. Fungsi utama pemerintah daerah khususnya Kecamatan Ponggok adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat, oleh karena itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama kecamatan Ponggok agar dapat menyajikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.

Penyusunan dokumen ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan tindak lanjut dari Surat Edaran Bupati Blitar Nomor B/027.02.04.01/287/409.3.2/2025. Renja PD Kecamatan Ponggok Tahun 2026 ini merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2026, serta berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Ponggok Tahun 2021-2026 dan arah kebijakan dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029.

Rancangan Akhir Renja PD Kecamatan Ponggok Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas serta landasan penyusunan anggaran di lingkungan Kecamatan Ponggok untuk Tahun Anggaran 2026. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan, berbagai upaya korektif serta masukan dari semua pihak senantiasa kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Dukungan dan kerja sama dari semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini, kami sampaikan terima kasih.

Ponggok, 20 Agustus 2025

CAMAT PONGGOK


DANY MUSAFI KAMIL, S.Sos., MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19800104 200312 1 008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4 SISTIMATIKA PENULISAN	6
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	22
2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).....	25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	37
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	44
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	44
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	45
3.3 Program dan Kegiatan	47
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	59
4.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ...	59
4.2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	63
4.3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	63
4.4 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	64
4.5 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	65
4.6 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	65
BAB V PENUTUP	66
5.1 Catatan Penting	66
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	66
5.3 Rencana Tindak Lanjut	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah atau selanjutnya disebut Rankhir Renja PD adalah dokumen rancangan akhir perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan sebuah proses fundamental yang sistematis untuk memastikan bahwa seluruh upaya pembangunan berjalan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun dokumen perencanaan tahunan yang disebut Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Akhir Renja PD Kecamatan Ponggok Tahun 2026 ini merupakan wujud kepatuhan terhadap kerangka regulasi tersebut, yang secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan secara spesifik diinstruksikan melalui Surat Edaran Bupati Blitar Nomor B/027.02.04.01/287/409.3.2/2025 tentang Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2026.

Penyusunan Renja PD untuk tahun 2026 memiliki arti dan momentum yang sangat strategis. Tahun 2026 merupakan tahun kedua dari periode perencanaan jangka menengah daerah yang baru, sekaligus menjadi tahun implementasi penuh pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029. Dokumen ini menjadi instrumen operasional perdana bagi Kecamatan Ponggok untuk menerjemahkan Visi Kepala

Bagan diatas menunjukkan gambaran umum alur penyusunan Renja PD secara keseluruhan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Blitar dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ponggok. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Blitar terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ponggok dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pada akhirnya, dokumen Rancangan Akhir Renja PD Kecamatan Ponggok Tahun 2026 ini akan berfungsi sebagai instrumen fundamental yang menjembatani antara tahapan perencanaan strategis dengan tahap penganggaran. Seluruh program, kegiatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif yang tertuang di dalamnya akan menjadi dasar utama bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Selanjutnya, RKA-PD tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2026. Dengan demikian, dokumen ini memastikan adanya alur yang jelas dan akuntabel dari visi hingga alokasi anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Ponggok Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 (sesuai nomor Perda setelah ditetapkan);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2026;
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
15. Surat Edaran Bupati Blitar Nomor B/027.02.04.01/287/409.3.2/2025 tentang Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Ponggok Tahun 2026 dimaksudkan untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan tahunan yang komprehensif, terukur, dan sistematis. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman operasional resmi bagi Kecamatan Ponggok dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengendalikan seluruh

program dan kegiatan prioritas selama satu tahun anggaran.

Secara lebih rinci, maksud dari penyusunan Renja PD ini adalah:

1. Tercapainya Keselarasan Dokumen Renja PD dengan RKPD 2026 dan RPJMD
2. Terwujudnya dokumen perencanaan yang sesuai dengan kaidah perencanaan dan saling bersinergi antar dokumen perencanaan lainnya.
3. Tercapainya Indikator Sasaran Renstra Pada Tahun 2029.
4. Menjadi Instrumen Penjabaran Dokumen Strategis: Menerjemahkan sasaran dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2026.
5. Menjamin Konsistensi Perencanaan: Memastikan adanya keselarasan dan kesinambungan antara perencanaan tahunan (Renja PD) dengan target-target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ponggok Tahun 2025-2029.
6. Menjadi Landasan Penganggaran: Menyediakan dasar yang jelas dan akuntabel bagi Kecamatan Ponggok dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran pada APBD Kabupaten Blitar Tahun 2026.
7. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja: Menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan pengukuran dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, sehingga setiap program dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan pencapaiannya kepada pimpinan dan masyarakat.

Dengan demikian, Renja PD Tahun 2026 ini menjadi dokumen sentral yang menghubungkan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan siklus penganggaran tahunan, demi tercapainya efektivitas dan efisiensi pembangunan di Kecamatan Ponggok.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Ponggok Tahun 2026 memiliki beberapa tujuan strategis yang saling berkaitan. Tujuan disusunnya Rancangan Akhir Renja adalah sebagai pedoman:

- 1) Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2026 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025;
- 2) Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Ponggok Tahun 2025-2029 pada tahun ke-2 (kedua) periode tahun 2026; dan
Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2026.

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Ponggok Tahun 2026 ini disusun dengan mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Surat Edaran Bupati Blitar Nomor B/027.02.04.01/287/409.3.2/2025. Sistematika penulisan dokumen ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan kerangka dasar penyusunan dokumen. Di dalamnya diuraikan Latar Belakang yang menjelaskan konteks strategis penyusunan Renja PD 2026, Landasan Hukum yang menjadi dasar yuridis, Maksud dan Tujuan yang ingin dicapai, serta diakhiri dengan Sistematika Penulisan yang menguraikan struktur dokumen.

2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Bab ini berisi analisis evaluasi yang komprehensif terhadap kinerja Kecamatan Ponggok pada tahun sebelumnya sebagai landasan untuk merumuskan rencana tahun 2026. Pembahasan mencakup Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat.

3. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

Bab ini merumuskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja PD, Program dan Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu-isu strategis yang

telah diidentifikasi pada bab sebelumnya.

4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini merupakan penjabaran detail dari Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Ponggok yang telah diinput pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mencakup program, kegiatan, subkegiatan.

5. BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini berfungsi sebagai penutup yang didalamnya diuraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut untuk memastikan implementasi Renja PD 2026 dapat berjalan efektif dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ponggok tahun lalu, yaitu Tahun 2024 (sebagai tahun n-2) dan menyajikan perkiraan capaian kinerja pada tahun berjalan tahun 2025 (tahun n-1) yang mengacu pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ponggok Tahun 2024 dan realisasi anggaran Kecamatan Ponggok Tahun 2024, kemudian dikaitkan dengan target capaian Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Ponggok Tahun 2021-2026 untuk menilai :

- Progres pencapaian sasaran jangka menengah,
- Identifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi,
- Analisis faktor-faktor penyebabnya,
- Merumuskan implikasi dan rekomendasi kebijakan strategis untuk penyusunan Renja PD Tahun 2026.

Berikut adalah analisis terhadap program dan kegiatan berdasarkan tingkat capaian kinerjanya :

1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Tahun 2024, satu program yang kinerjanya belum berhasil mencapai target yang ditetapkan dan berdampak pada pencapaian Sasaran Strategis terkait akuntabilitas.

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Realisasi Kinerja : Program ini mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan Indikator Kinerja Sasaran *Nilai / Predikat SAKIP*. Realisasi kinerja hanya mencapai nilai 52,6 / Predikat "CC", atau tidak memenuhi target 80 / Predikat "A". Realisasi anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp1.842.814.460 atau 90,36% dari pagu sebesar Rp. 2.039.326.982.

2) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

a. Realisasi Kinerja

Program ini juga mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa. Indikator Kinerja Sasaran :

- Presentase desa yang memiliki administrasi baik realisasi 42,17% dari target 95%. Realisasi anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 20.095.000 atau 65,71% dari pagu sebesar Rp. 30.580.000.
- Presentase desa mandiri di kecamatan realisasi 33,3% dari target 70%. Realisasi anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 13.620.000 atau 42,17% dari pagu sebesar Rp. 32.295.600.
- Jumlah keeksisan Bumdes mencapai realisasi 4 desa dari target 10 desa yang eksis.

Realisasi anggaran untuk program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebesar Rp 55.300.000 atau 61,08% dari pagu sebesar Rp. 90.525.505.

b. Faktor Penyebab

Tidak tercapainya target pada kedua program ini memberikan implikasi yang signifikan. Kegagalan mencapai target SAKIP secara langsung menghambat pencapaian Sasaran Strategis Renstra "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah" dan melemahkan kerangka pengukuran kinerja organisasi. Sementara itu, tidak tercapainya target desa yang presentase desa memiliki administrasi baik, Persentase desa mandiri di kecamatan serta Jumlah keeksisan BUMDes menghambat laju pencapaian sasaran penguatan kelembagaan ekonomi di tingkat desa.

c. Implikasi terhadap Target Capaian Program Renstra PD

Tidak tercapainya target pada kedua program ini memberikan implikasi yang signifikan. Kegagalan mencapai target SAKIP secara langsung menghambat pencapaian Sasaran Strategis

Renstra "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah" dan melemahkan kerangka pengukuran kinerja organisasi. Sementara itu, tidak tercapainya target target desa yang presentase desa memiliki administrasi baik, Persentase desa mandiri di kecamatan serta Jumlah keeksian BUMDes menghambat laju pencapaian sasaran penguatan kelembagaan ekonomi di tingkat desa dan menghambat administrasi dan kemandirian desa.

- d. Kebijakan/ Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Menjadi prioritas utama pada Renja PD 2026 untuk mengalokasikan anggaran pada kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik dan berdampak. Untuk SAKIP, perlu dianggarkan kegiatan pendampingan intensif (bukan hanya bimtek) terkait penyusunan perjanjian kinerja dan pelaporan yang tepat waktu. Untuk presentase desa memiliki administrasi baik, Persentase desa mandiri di kecamatan serta Jumlah keeksian BUMDes, kebijakan penganggaran harus diarahkan pada kegiatan peningkatan kapasitas manajerial, peningkatan sumber daya manusia pada perangkat desa dan fasilitasi pengembangan usaha bagi BUMDes yang masih belum berada di kategori BUMDes yang eksis.

2. Realisasi Program/ Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Beberapa program strategis berhasil dilaksanakan dengan capaian kinerja yang tepat sesuai dengan target 100%.

1) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- a. Realisasi Kinerja: Program ini mendukung Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa. Indikator Kinerja Sasaran Persentase Keluhan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan yang ditindaklanjuti mencapai realisasi 100%, atau memenuhi target 100%. Realisasi anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 17.250.000 atau 60,48% dari pagu sebesar Rp. 28.519.791.

2) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

UMUM

- a. Realisasi Kinerja: Program ini mendukung Sasaran Strategis: Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemerintahan Umum. Indikator Kinerja Sasaran Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan mencapai realisasi 100% dari target 100% namun realisasi anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 1.500.000 atau 34,29% dari pagu sebesar Rp. 4.375.000 yaitu ada pertemuan/ sosialisasi yang tidak terlaksananya dikarenakan sudah difasilitasi dengan dana desa.

3. Realisasi Program/ Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan tidak ada

1. Faktor Penyebab

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan :

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang ada
Kompleksnya berbagai pekerjaan di Kecamatan harus berbanding lurus dengan keahlian/skil aparatur yang ada, oleh karena itu perlunya diadakan Pendidikan pelatihan sesuai kebutuhan teknis.
- b. Kurang maksimalnya sarana dan prasarana di sekitar kantor
Kondisi fisik bangunan Kecamatan Ponggok sudah cukup baik, namun ruang pelayanan seperti selayaknya pelayanan PATEN tetapi sampai sekarang masih belum optimal/ kurang adanya sarana prasarana penunjang untuk mewujudkan kantor kecamatan yang representative, aman, nyaman, ramah anak, ramah lansia dan peduli terhadap perempuan. Misalnya ruang tunggu yang nyaman, playground, ruang laktasi, loket antrian, kantor dan lingkungannya yang bersih dan nyaman.
- c. Kurangnya optimalnya faktor pendukung sarana prasarana.
Pelayanan Kecamatan Ponggok sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kemudahan akses informasi. Sehingga dibutuhkan sarana penunjang berupa perangkat komputer lengkap yang terhubung jaringan Internet agar memudahkan dalam pelayanan.

2. Implikasi terhadap Target Capaian Program Renstra PD

Tercapainya target secara langsung mendukung realisasi berbagai sasaran Renstra secara signifikan dan memperkuat pencapaian Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa serta terjaganya stabilitas keamanan dan ketertiban umum dengan memberikan bukti konkret pelayanan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan menindaklanjuti aduan baik lewat aplikasi maupun secara langsung datang ke kecamatan.

Keberhasilan pada program pembinaan desa dan urusan pemerintahan umum serta Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum menjadi fondasi penting bagi stabilitas, tata kelola yang baik, dan kemajuan wilayah secara keseluruhan. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian program Renstra Kecamatan Ponggok adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Ponggok tahun 2021-2026 berdampak positif yang menunjukkan keberhasilan kinerja selama periode Renstra.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra berdampak kurang optimalnya capaian kinerja selama periode Renstra sehingga perlu dilakukan evaluasi dan monev dan diperlukan tinjauan ulang terhadap target Renja periode tahun berikutnya.

3. Kebijakan/ Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu diambil Kebijakan untuk tahun 2026 adalah tidak hanya mempertahankan strategi yang telah berjalan efektif, tetapi juga mengembangkannya. Secara spesifik, perlu adanya alokasi anggaran khusus dalam Renja PD 2026 untuk pelembagaan dan keberlanjutan inovasi, mencakup biaya operasional dan sosialisasi agar jangkauannya semakin luas. Perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut :

- a. Perencanaan yang implementatif.
- b. Koordinasi Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
- c. Perlu adanya koordinasi kepada instansi pengampu terkait masalah

pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan.

- d. Koordinasi lintas sektoral lebih optimal.
- e. Peningkatan kualitas SDM perencana melalui pendidikan dan pelatihan teknis.
- f. Peningkatan pemahaman bersama tentang proses dan mekanisme dalam konsistensi perencanaan dan penganggaran secara terpadu.

Untuk program lainnya, fokusnya adalah menjaga konsistensi pelaksanaan program dengan memastikan alokasi anggaran yang tetap memadai, serta mulai merumuskan kegiatan lanjutan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas.

Berikut disajikan Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025. Tabel ini menyajikan perbandingan komprehensif antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan realisasi capaian kinerja dan serapan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel 2.1

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Blitar
Renja Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar
Periode Pelaksanaan 2025**

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar yang mengacu pada sasaran RKPD

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(12/7)*100%	14=6+12	15=(14/5)*100% Rp=14			16						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp			
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 0	11.897.058.170,00	100 0	8.908.886.763,00	0100 0	1.940.239.933,00	25 0	459.349.348,00	55 0	529.255.590,00	0 0	0,00	0 0	0,00	55 0	987.804.936,00	50,90	77,50 0	7.896.491.699,00	77,50 NaN		7.896.491.699,00	Kecamatan Ponggok	
2	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	40 8	38.698.000,00	18 8	14.651.900,00	8 8	4.110.400,00	0 2	0,00	0 0	1.000.000,00	0 0	0,00	0 0	0,00	0 2	1.000.000,00	32,50	24,33 2	15.651.900,00	40,00 25,00	42,65	15.651.900,00	Kecamatan Ponggok	
3	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	24.198.000,00	36	10.801.900,00	9	1.105.200,00	2	0,00	2	1.000.000,00	2	0,00	3	0,00	3	1.000.000,00	216,67	90,48	19,50	11.801.900,00	216,67	48,77	11.801.900,00	Kecamatan Ponggok
4	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	25	12.500.000,00	16,5	3.850.000,00	5	3.005.200,00		0,00	1	0,00	2	0,00	2	0,00	5	0,00	86,00	0,00	21,5	3.850.000,00	86,00	30,80	3.850.000,00	Kecamatan Ponggok
5	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akurat	100 100	9.898.950.870,00	100 100	5.713.061.081,00	100 100	1.538.835.633,00	25 25	414.116.193,00	50 0	430.980.650,00	0 0	0,00	0 0	0,00	75 25	845.096.843,00	100,00	54,92 25	175 25	6.558.157.924,00	175,00 25,00	66,25	6.558.157.924,00	Kecamatan Ponggok
6	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11	9.743.280.870,00	45	5.652.634.081,00	11	1.516.717.833,00	3	414.116.193,00	3	422.145.650,00	3	0,00	2	0,00	11	836.261.843,00	509,09	55,14	56	6.488.915.924,00	509,09	66,60	6.488.915.924,00	Kecamatan Ponggok
7	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Pembastaraan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pembastaraan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24	137.900.000,00	24	54.785.000,00	24	20.641.000,00	6	0,00	6	8.835.000,00	6	0,00	6	0,00	6	8.835.000,00	62,50	42,80	15,00	63.620.000,00	62,50	46,13	63.620.000,00	Kecamatan Ponggok
8	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	17.770.000,00	20	5.622.000,00	5	1.476.800,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	2	0,00	2	0,00	220,00	0,00	11,00	5.622.000,00	220,00	31,64	5.622.000,00	Kecamatan Ponggok

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
				1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6+12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp	
II	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80	49.900.000,00	96	47.480.000,00	100	16.107.000,00	25	2.250.000,00	50	820.000,00		0,00		0,00	75	3.070.000,00	285,00	19,06	171	50.530.000,00	285,00	101,28	50.530.000,00	Kecamatan Pongkok
10	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	49.900.000,00	12	47.480.000,00	12	16.107.000,00	4	2.250.000,00	4	820.000,00	4	0,00	4	0,00	4	3.070.000,00	86,67	19,06	8,00	50.530.000,00	86,67	101,28	50.530.000,00	Kecamatan Pongkok
11	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	100 12	567.025.000,00	100 12	306.102.385,00	100 12	108.329.700,00	25 3	3.305.000,00	50 0	42.174.724,00	0 0	0,00	0 0	0,00	75 3	45.979.724,00	100,00	42,44	175 3	352.082.109,00	175,00 25,00	62,09	352.082.109,00	Kecamatan Pongkok
12	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	48.500.000,00	25	17.080.300,00	6	6.397.300,00	1	0,00	1	2.316.500,00	2	0,00	2	0,00	6	2.316.500,00	103,33	36,21	31	20.296.800,00	103,33	41,85	20.296.800,00	Kecamatan Pongkok
13	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30	240.725.000,00	26	151.885.485,00	6	40.959.450,00	1	0,00	1	17.922.724,00	2	0,00	2	0,00	6	17.922.724,00	106,67	43,76	32	169.808.209,00	106,67	70,54	169.808.209,00	Kecamatan Pongkok
14	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50	36.200.000,00	40	34.224.500,00	10	5.714.200,00	2	0,00	2	3.067.500,00	3	0,00	3	0,00	10	3.067.500,00	100,00	53,68	50	37.292.000,00	100,00	103,02	37.292.000,00	Kecamatan Pongkok
15	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25	71.800.000,00	20	35.401.500,00	5	31.843.350,00	1	3.305.000,00	1	11.156.000,00	1	0,00	2	0,00	5	14.461.000,00	100,00	45,41	25	49.862.500,00	100,00	68,45	49.862.500,00	Kecamatan Pongkok
16	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1500	84.900.000,00	1200	14.079.000,00	300	8.815.400,00	75	500.000,00	75	737.000,00	75	0,00	75	0,00	300	1.257.000,00	100,00	14,03	1500	15.256.000,00	100,00	17,97	15.256.000,00	Kecamatan Pongkok
17	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	84.900.000,00	103	52.591.600,00	30	14.600.000,00	7,5	0,00	7,5	6.975.000,00	7,5	0,00	7,5	0,00	30	6.975.000,00	88,67	47,77	133	59.566.600,00	88,67	70,16	59.566.600,00	Kecamatan Pongkok
18	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tepat sasaran	35 20	170.890.000,00	6 15	29.850.000,00	9 5	11.318.800,00	0 0	0,00	0 0	0,00	0 0	0,00	0 0	0,00	0 0	0,00	46,07	0,00	6 15	29.850.000,00	17,14 75,00	17,48	29.850.000,00	Kecamatan Pongkok
19	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	87.900.000,00	5	22.850.000,00	2	0,00	0,5	0,00	0,5	0,00	0,5	0,00	0,5	0,00	0,5	0,00	10,00		0,5	22.850.000,00	10,00	26,00	22.850.000,00	Kecamatan Pongkok
20	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	82.900.000,00	4	7.000.000,00	4	11.318.800,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	20,00	0,00	1	7.000.000,00	20,00	8,44	7.000.000,00	Kecamatan Pongkok
21	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan Tepat Waktu	100	672.350.000,00	100	577.344.922,00	100	210.963.400,00	25	38.328.153,00	50	50.342.216,00		0,00		0,00	50	88.870.369,00	75,00	42,63	75,00	666.015.291,00	75,00	99,06	666.015.291,00	Kecamatan Pongkok

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6+12		15=(14/5)*100% Rp=14			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6+12		15=(14/5)*100% Rp=14			16
22	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400	22.900.000,00	250	1.640.000,00	400	2.840.000,00	100	1.000.000,00	100	1.500.000,00	100	0,00	100	0,00	100	2.800.000,00	43,75	98,48	175,00	4.240.000,00	43,75	18,52	4.240.000,00	Kecamatan Ponggok
23	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	68.500.000,00	36	38.514.022,00	36	13.048.000,00	9	1.507.009,00	9	2.810.497,00	9	0,00	9	0,00	9	4.317.505,00	62,50	53,09	22,50	42.632.428,00	62,50	62,24	42.632.428,00	Kecamatan Ponggok
24	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	580.950.000,00	6	537.390.000,00	6	195.275.400,00	1	35.821.144,00	1	45.931.719,00	2	0,00	2	0,00	2	81.752.863,00	66,67	41,87	4,00	619.142.863,00	66,67	105,57	619.142.863,00	Kecamatan Ponggok
25	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	12 80	501.334.300,00	12 60	220.416.475,00	12 20	50.575.000,00	5 0	850.000,00	03 0	2.938.000,00	0 0	0,00	0 0	0,00	6 0	3.788.000,00	112,50	7,49	18 60	224.204.475,00	150,00 75,00	44,72	224.204.475,00	Kecamatan Ponggok
26	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	636	140.300.000,00	36	98.302.130,00	36	19.235.000,00	9	0,00	9	2.218.000,00	9	0,00	9	0,00	9	2.218.000,00	3,54	11,53	22,50	100.520.130,00	3,54	67,33	100.520.130,00	Kecamatan Ponggok
27	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110	185.620.000,00	88	57.178.690,00	22	2.920.000,00	5	850.000,00	5	720.000,00	6	0,00	6	0,00	22	1.570.000,00	100,00	53,77	110	58.748.690,00	100,00	31,65	58.748.690,00	Kecamatan Ponggok
28	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	166.414.300,00	8	84.935.655,00	2	28.420.000,00		0,00		0,00	1	0,00	1	0,00	2	0,00	100,00	0,00	10	84.935.655,00	100,00	39,02	84.935.655,00	Kecamatan Ponggok
29	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan yang ditindaklanjuti	100	370.871.900,00	95	44.006.000,00	100	58.745.000,00	025	0,00	050	2.500.000,00	0	0,00	0	0,00	50 0 0	2.500.000,00	50,00	4,26	50	46.506.000,00	50,00	50,00	46.506.000,00	Kecamatan Ponggok
30	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan	80	205.728.900,00	12	34.971.000,00	12	35.625.000,00	4	0,00	4	2.500.000,00		0,00		0,00	8	2.500.000,00	33,33	6,86	20	37.471.000,00	33,33	18,21	37.471.000,00	Kecamatan Ponggok
31	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	50	205.728.900,00	40	34.971.000,00	40	35.625.000,00	10	0,00	10	2.500.000,00	10	0,00	10	0,00	10	2.500.000,00	20,00	6,98	10	37.471.000,00	20,00	18,21	37.471.000,00	Kecamatan Ponggok
32	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Layanan Yang dilaksanakan	8 100	165.143.000,00	6 80	9.035.000,00	6 10	22.920.000,00	2 2	0,00	0 0	0,00	0 0	0,00	0 0	0,00	2 2	0,00	74,34	0,00	4,00 82	9.035.000,00	66,67 82,00	5,47	9.035.000,00	Kecamatan Ponggok
33	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	370	165.143.000,00	370	9.035.000,00	370	22.920.000,00	90	0,00	90	0,00	90	0,00	100	0,00	100	0,00	63,51	0,00	235,00	9.035.000,00	63,51	5,47	9.035.000,00	Kecamatan Ponggok

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Dwerah s.d Tahun 2025 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=8+12		15=(14/5)*100% Rp=14			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp	
34	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam pemberdayaan desa dan kelurahan	100	1.073.781.200,00	100	3.828.600.000,00	100	45.110.600,00	20	11.920.000,00	30	0,00		0,00		0,00	50	11.920.000,00	150,00	26,42	150	3.840.520.000,00	150,00	150,00	3.840.520.000,00	Kecamatan Ponggok
35	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	80	1.073.781.200,00	60	3.828.600.000,00	20	45.110.600,00	2	11.920.000,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	7	11.920.000,00	83,75	26,42	67	3.840.520.000,00	83,75	357,66	3.840.520.000,00	Kecamatan Ponggok
36	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lomba Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	90	1.073.781.200,00	54	3.828.600.000,00	18	45.110.600,00	4	11.920.000,00	4	0,00	4	0,00	6	0,00	18	11.920.000,00	80,00	26,42	72	3.840.520.000,00	80,00	357,66	3.840.520.000,00	Kecamatan Ponggok
37	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	25	529.267.300,00	5	28.022.000,00	5	8.249.300,00	1	0,00	2	2.400.000,00		0,00		0,00	3	2.400.000,00	32,00	20,09	8	30.422.000,00	32,00	32,00	30.422.000,00	Kecamatan Ponggok
38	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah koordinasi dan fasilitasi penegakan perda dan perkara yang dilakukan	30	529.267.300,00	40	28.022.000,00	8	8.249.300,00	2	0,00	0	2.400.000,00	0	0,00	0	0,00	2	2.400.000,00	84,00	20,09	42	30.422.000,00	84,00	5,75	30.422.000,00	Kecamatan Ponggok
39	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	150	529.267.300,00	120	28.022.000,00	30	8.249.300,00	7,5	0,00	7,5	2.400.000,00	7,5	0,00	7,5	0,00	30	2.400.000,00	100,00	20,09	150	30.422.000,00	100,00	5,75	30.422.000,00	Kecamatan Ponggok
40	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Gangguan Kenyamanan SARA yang ditangani	100	1.132.891.524,00		219.808.500,00	100	102.664.600,00	15	2.325.000,00	035	15.077.500,00		0,00		0,00	50	17.402.500,00	50,00	16,95	50	237.211.000,00	50,00	50,00	237.211.000,00	Kecamatan Ponggok
41	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi yang diselenggarakan	25	1.132.891.524,00	0	219.808.500,00	5	102.664.600,00	2	2.325.000,00	2	15.077.500,00	0	0,00	0	0,00	4	17.402.500,00	48,00	16,95	4	237.211.000,00	16,00	20,94	237.211.000,00	Kecamatan Ponggok
42	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	20	1.132.891.524,00	16	219.808.500,00	4	96.664.600,00	1	2.325.000,00	1	15.077.500,00	1	0,00	1	0,00	4	17.402.500,00	100,00	18,00	20	237.211.000,00	100,00	20,94	237.211.000,00	Kecamatan Ponggok
43	7.01.05.2.01.0006	Palaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0,00		0,00	8	6.000.000,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	Kecamatan Ponggok
44	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya	100	401.739.205,00	100	111.125.000,00	100	26.749.300,00	20	0,00	30	8.920.000,00		0,00		0,00	30	8.920.000,00	65,00	25,87	65,00	118.045.000,00	63,00	45,00	118.045.000,00	Kecamatan Ponggok

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6+12		15=(14/5)*100% Rp=14			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp	
45	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah rekomendasi,koordinasi, dan pengawasan yang dilaksanakan	50 14	401.739.205,00	14 14	111.125.000,00	28 14	26.749.300,00	5 4	0,00	15 0	6.920.000,00	0 0	0,00	0 0	0,00	20 4	6.920.000,00	48,28	25,87	34 4	118.045.000,00	68,00 28,57	29,38	118.045.000,00	Kecamatan Ponggok
46	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	150	202.610.000,00	120	32.550.000,00	30	12.149.300,00	7,5	0,00	7,5	0,00	7,5	0,00	7,5	0,00	30	0,00	100,00	0,00	150	32.550.000,00	100,00	16,07	32.550.000,00	Kecamatan Ponggok
47	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15	84.893.205,00	15	46.075.000,00	15	11.060.000,00	4	0,00	4	4.920.000,00	4	0,00	3	0,00	3	4.920.000,00	60,00	44,48	9,00	50.995.000,00	60,00	60,07	50.995.000,00	Kecamatan Ponggok
48	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	150	114.236.000,00	120	32.500.000,00	30	3.540.000,00	7,5	0,00	7,5	2.000.000,00	7,5	0,00	7,5	0,00	30	2.000.000,00	100,00	56,50	150	34.500.000,00	100,00	30,20	34.500.000,00	Kecamatan Ponggok
TOTAL				15.405.609.299,00		11.140.448.263,00		2.181.758.733,00		473.594.346,00		555.153.090,00		0,00		0,00		1.028.747.438,00		153,49		12.169.195.699,00		12.169.195.699,00			
Rata-rata Capaian Kinerja Program																							57,83%	82,11%			
Predikat Kinerja Program																							Rendah	Tinggi			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai tingkat keberhasilan Kecamatan Ponggok dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya pada tahun 2024, serta membandingkannya dengan target dan capaian tahun sebelumnya.

Analisis Kinerja dilaksanakan untuk menganalisis program dan kegiatan yang dilaksanakan di OPD Kecamatan Ponggok selama tahun 2024. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota indikatornya Nilai SAKIP Perangkat Daerah tercapai predikat CC pada tahun 2024.
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah indikatornya Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan sesuai target 14 dokumen.
 - b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah indikatornya Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu terlaksana sesuai target yaitu 12 bulan.
 - c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah indikatornya adalah Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel terlaksana sesuai target yaitu 12 bulan.
 - d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah indikatornya adalah Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terlaksana sesuai target yaitu 7 jenis.
 - e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah indikatornya adalah Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana sesuai target yaitu 12 bulan.
 - f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah indikatornya Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana sesuai target yaitu 12 bulan.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan indikator program adalah Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dengan desa/kelurahan terlaksana sesuai target yaitu 1 kegiatan
 - a) Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa indikatornya adalah Jumlah koordinasi yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan terlaksana sesuai target yaitu 1 kegiatan.
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum indikatornya Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan terlaksana sesuai target yaitu 1 kegiatan
 - a) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum indikatornya Jumlah kegiatan yang dilaksanakan terlaksana sesuai target yaitu 1 kegiatan.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum indikatornya Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yg dilakukan terlaksana sesuai target yaitu 1 kegiatan.
 - a) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah indikatornya Jumlah koordinasi yang diselenggarakan terlaksana sesuai target yaitu 1 kegiatan
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa indikatornya Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan dan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta pembangunan fisik yang ditindaklanjuti yaitu :
 - a) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa indikatornya Jumlah Rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan yang dilaksanakan terlaksana sesuai target yaitu 15 desa.

Tabel di bawah ini menyajikan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Ponggok secara komparatif, sumber data dari dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 dan dokumen Perbandingan Target Renstra, Target Perkin, dan Realisasinya. Data ini menjadi dasar dalam mengidentifikasi kekuatan dan area yang memerlukan perbaikan dalam perencanaan tahun 2026.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

No	INDIKATOR (IKU)	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
				n-2 2024	n-1 2025	n 2026	N+1 2027	n-2 2024	N-1 2025	n 2025	N+1 2027	Analisis
1	Persentase Keluhan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan yg ditindak lanjuti	-	-	100%	100%	100%	-	100%	-	100%	-	-
2	Nilai/ Predikat SAKIP	-	-	A	A	A	-	52.6/C C	-	B	-	-
3	Persentase Desa yang memiliki Administrasi yang baik	-	-	90%	95%	100%	-	42,17 %	-	100%	-	-
4	Presentase desa mandiri di kecamatan	-	-	70%	75%	100%	-	33,3%	-	75%	-	-
5	Keeksisan Bumdes	-	-	10	12	15	-	4	-	12	6	-
6	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	-	-	95%	100%	100%	-	100%	-	100%	-	-

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja yang telah diuraikan pada sub- bab sebelumnya, teridentifikasi beberapa isu penting dan strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ponggok. Isu-isu ini tidak hanya mencerminkan capaian tahun 2024, tetapi juga menjadi catatan krusial yang akan menjadi landasan dalam perumusan program dan kegiatan prioritas untuk tahun 2026.

1. Tingkat Kinerja Pelayanan dan Hal Kritis yang Terkait Secara umum, tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Ponggok pada tahun 2024 menunjukkan sebuah gambaran yang dualistik. Di satu sisi, kinerja pelayanan yang berhadapan langsung dengan masyarakat (pelayanan eksternal) menunjukkan capaian yang sangat memuaskan. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya target penanganan keluhan 100% dan didukung oleh capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang sangat tinggi. Di sisi lain, terdapat isu kritis pada kinerja internal yang menyangkut fondasi akuntabilitas dan efektivitas program. Hal ini tecermin dari dua kegagalan pencapaian target pada 2 program, yaitu pada Indikator Kinerja Sasaran *Nilai SAKIP* (realisasi 52,6 dari target 80) dan Presentase desa yang memiliki administrasi baik realisasi 42,17% dari target 95%, Presentase desa mandiri di kecamatan realisasi 33,3% dari target 70% serta jumlah keeksisan Bumdes mencapai realisasi 4 desa dari target 10 desa yang eksis.
2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dari analisis kinerja, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dan hambatan utama yang saling terkait:
 - a) Kelemahan Sistem Akuntabilitas Kinerja: Permasalahan mendasar adalah belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Rendahnya nilai SAKIP bukan sekadar angka, melainkan indikasi dari proses perencanaan dan pengukuran kinerja yang belum sepenuhnya terstruktur. Hambatan utamanya meliputi proses penjenjangan kinerja (cascading) dari level pimpinan hingga staf belum terimplementas optimal, sasaran strategis Camat belum terurai secara sistematis menjadi target kinerja yang jelas bagi tiap seksi dan individu. Selain itu, meskipun evaluasi internal sudah berjalan, proses pelaporan yang sering terlambat menunjukkan adanya kendala dalam disiplin dokumentasi dan manajemen waktu.
 - b) Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Desa: Belum tercapainya target

Presentase desa yang memiliki administrasi baik realisasi 42,17% dari target 95%, Presentase desa mandiri di kecamatan realisasi 33,3% dari target 70% serta Jumlah keeksian Bumdes mencapai realisasi 4 desa dari target 10 desa yang eksis mengindikasikan bahwa intervensi yang dilakukan belum cukup untuk mendorong administrasi, desa mandiri dan jumlah keeksian BUMDes. Hambatannya bukan pada ketersediaan anggaran, melainkan pada aspek-aspek teknis seperti kurangnya perangkat desa memahami dan manajemen administrasi dan kemandirian desa serta kapasitas manajerial pengurus BUMDes, inovasi produk/ jasa yang masih terbatas, dan strategi pemasaran yang belum optimal.

- c) Hambatan dari Sisi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia: Terdapat hambatan signifikan dari sisi kelembagaan, yaitu kurangnya dan tidak tertatanya data serta arsip tahun sebelumnya.

3. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Isu-isu tersebut memiliki dampak langsung terhadap pencapaian Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029:

- a) Rendahnya Nilai SAKIP menjadi penghambat serius bagi pencapaian Misi ke-3 pada aspek "meningkatkan kinerja birokrasi yang akuntabel", karena akuntabilitas adalah prasyarat utama dari birokrasi yang berkinerja.
- b) Belum tercapainya target Presentase desa yang memiliki administrasi baik, Presentase desa mandiri di kecamatan serta Jumlah keeksian Bumdes berisiko menghambat kontribusi Kecamatan dalam mendukung Misi ke-1 (peningkatan kualitas SDM dan keluarga sejahtera) dan Misi ke-2 (pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi lokal).

4. Tantangan dalam Peningkatan Pelayanan

a. Tantangan:

- 1) Internal: Tantangan terbesar adalah membangun budaya kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) untuk memperbaiki capaian SAKIP, bukan sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran. Selain itu, tantangan signifikan lainnya adalah menjaga keberlanjutan inovasi di tengah pelayanan optimal kepada masyarakat.
- 2) Eksternal: Meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang serba cepat dan digital menuntut adanya inovasi yang berkelanjutan, tidak hanya sesaat.

5. Formulasi Isu-isu Penting (Rekomendasi Strategis) Berdasarkan

seluruh analisis di atas, dirumuskan tiga isu strategis utama yang harus menjadi fokus dalam penyusunan Renja PD 2026:

- a. Penguatan kapasitas internal dan pemberdayaan eksternal terdapat dua area kelemahan harus segera diintervensi, yaitu:
 - 1) Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal yang perlu diperbaiki secara fundamental;
 - 2) Presentase desa yang memiliki administrasi baik, Presentase desa mandiri di kecamatan serta Jumlah keeksikan Bumdes diperlukan pendampingan dan monev rutin agar menghasilkan desa sesuai dengan tujuan strategis kecamatan
 - 3) Kapasitas Kelembagaan BUMDes yang memerlukan model pendampingan baru yang lebih fokus pada aspek manajerial dan pengembangan usaha.
- b. Pelembagaan dan Keberlanjutan Inovasi Unggulan: harus ditindaklanjuti dengan kebijakan dan alokasi anggaran yang jelas dalam Renja 2026 untuk melembagakan, memelihara, dan mengembangkan inovasi agar dampaknya berkelanjutan dan tidak bergantung pada individu semata.
- c. Optimalisasi dan Pemenuhan Struktur Organisasi : Perlu adanya motivasi dan inovasi semua unsur dalam internal kecamatan agar tercipta budaya efektifitas dan optimalisasi pelayanan di perangkat daerah.

Berdasarkan isu-isu strategis dan hambatan yang dialami Kecamatan Ponggok, maka diperlukan Rencana Tindak Lanjut yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan antara lain:

1. Tambahkan staf P3K kepada BKPSDM Kabupaten Blitar;
2. Meningkatkan Sistem Perencanaan yang terintegrasi dengan baik yang dituangkan dalam DPA SKPD dengan cara mengusulkan kepada SKPD terkait untuk menyiapkan Bimtek penyusunan program dan kegiatan kepada semua PPTK;
3. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) untuk dapatnya mengubah manajemen publik konvensional dengan menggunakan manajemen publik yang berbasis IT;
4. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) untuk dapatnya menambah sub kegiatan pada kegiatan yang dapat menangani masalah yang menjadi isu strategis Kecamatan Ponggok misal Peningkatan Kapasitas SDM/Bimtek atau sub kegiatan yang sesuai dengan tema RKPD;

5. Mengusulkan kepada pimpinan khususnya perbaikan pada penataan arsip dokumen vital.

2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 Tahun 2025 merupakan proses krusial untuk memastikan adanya sinkronisasi dan keselarasan antara perencanaan makro di tingkat kabupaten dengan perencanaan mikro yang berbasis pada kebutuhan nyata di tingkat Perangkat Daerah.

1. Proses yang Dilakukan

Proses review ini dilakukan melalui telaah dokumen (desk analisis) yang membandingkan dua sumber utama. Di satu sisi adalah dokumen RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2026, yang menyajikan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta program dan pagu indikatif yang bersifat makro dan mengikat (top-down). Di sisi lain adalah hasil analisis kebutuhan internal Kecamatan Ponggok, yang datanya digali dari hasil evaluasi kinerja tahun 2024 dan identifikasi isu-isu strategis yang telah diuraikan pada sub-bab 2.1, 2.2, dan 2.3 dalam dokumen ini (bottom-up).

2. Alasan Proses Dilakukan

Proses perbandingan dilakukan dengan beberapa alasan strategis:

a. Untuk Menjamin Sinkronisasi dan Sinergi

Memastikan bahwa rencana kerja yang akan disusun oleh Kecamatan Ponggok selaras dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan dalam Ranwal RKPD.

b. Sebagai Dasar Justifikasi Usulan

Menjadi landasan argumentasi yang kuat dan berbasis data bagi Kecamatan Ponggok dalam mengusulkan program, kegiatan dan anggaran khusus pada tahapan perencanaan selanjutnya (seperti Musrenbang RKPD). Usulan tidak lagi bersifat aspiratif semata, melainkan didasarkan pada analisis, kebutuhan dan kesenjangan kinerja.

c. Untuk Meningkatkan Efektivitas Perencanaan

Memastikan Rencana Kerja (Renja) PD yang akan disusun bersifat realistis, relevan, dan mampu menjawab permasalahan paling krusial yang dihadapi oleh Kecamatan Ponggok.

3. Temuan-temuan dan Catatan Penting

Dari proses perbandingan, ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

a. Keselarasan Program

Secara umum, program-program yang tercantum dalam Ranwal RKPD, seperti Program Penunjang Urusan Pemerintahan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, serta Program Pemberdayaan Masyarakat, telah selaras dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ponggok.

b. Perbedaan dan Kebutuhan Spesifik

Ranwal RKPD sebagai dokumen makro belum merinci kegiatan-kegiatan teknis yang dibutuhkan untuk mengatasi isu-isu spesifik di Kecamatan Ponggok. Oleh karena itu, ditemukan beberapa rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD namun sangat dibutuhkan berdasarkan hasil analisis, yaitu :

1. Kegiatan Penguatan Kapasitas SAKIP

Sebagai tindak lanjut langsung dari tidak tercapainya target Sasaran Strategis 2 (Akuntabilitas Kinerja).

2. Kegiatan pendampingan dan peningkatan monev desa

Upaya peningkatan administrasi desa yang baik, desa mandiri dilakukan monitoring dan evaluasi perangkat desa guna meningkatkan dan optimalisasi tujuan program.

3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Manajerial BUMDes

Sebagai intervensi untuk mengatasi tidak tercapainya target sasaran strategis kelima terkait jumlah keeksisan Bumdes.

4. Kegiatan Keberlanjutan Inovasi Unggulan

Diperlukan alokasi anggaran khusus guna mengembangkan inovasi dengan menciptakan aplikasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Uraian diatas, secara terperinci temuan-temuan ini dirangkum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Tahun 2026 Kabupaten Blitar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar, Kec. Ponggok, Kecamatan Semuanan Kel/Desa	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	90%	1.899.602.249	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar, Kec. Ponggok, Kecamatan Semuanan Kel/Desa	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	90%	1.899.602.249	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Kab. Blitar, Kec. Ponggok,	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	4 Kegiatan	4.244.584	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Kab. Blitar, Kec. Ponggok,	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	4 Kegiatan	4.244.584	

	Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kel/Desa	KinerjaPerangkat Daerah			Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kel/Desa	KinerjaPerangkat Daerah			
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Blitar, Kecamatan Ponggok, Semua Kel/Desa	Terselenggara Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Kegiatan	1.562.974.549	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Blitar, Kecamatan Ponggok, Semua Kel/Desa	Terselenggara Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Kegiatan	1.562.974.549	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Blitar, Kecamatan Ponggok, Semua Kel/Desa	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Kegiatan	9.930.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Blitar, Kecamatan Ponggok, Semua Kel/Desa	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Kegiatan	9.930.000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Blitar, Kecamatan Ponggok	Terlaksananya Administrasi UmumPerangkat Daerah	6 Kegiatan	108.973.584	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Blitar, Kecamatan Ponggok	Terlaksananya Administrasi UmumPerangkat Daerah	6 Kegiatan	108.973.584	

		, Semua Kel/Desa					Semua Kel/Desa					
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Blitar, Kec. Ponggok , Semua Kel/Desa	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Kegiatan	14.155.800	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Blitar, Kec. Ponggok, Semua Kel/Desa	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Kegiatan	14.155.800		
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Blitar, Kec. Ponggok , Semua Kel/Desa	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	134.266.632	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Blitar, Kec. Ponggok, Semua Kel/Desa	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	134.266.632		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Blitar, Kec. Ponggok, Semua Kel/Desa	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	3 Kegiatan	65.057.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Blitar, Kec. Ponggok, Semua Kel/Desa	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	3 Kegiatan	65.057.500	
9	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kab. Blitar, Kec. Ponggok, Semua Kel/Desa	Persentase pelayanan kecamatan (kelurahan) berkualitas baik	90%	26.500.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kab. Blitar, Kec. Ponggok, Semua Kel/Desa	Persentase pelayanan kecamatan (kelurahan) berkualitas baik	90%	26.500.000	

10	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Blitar, Kec. Ponggok, Semua Kel/Desa	Terselenggarakan 1 Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	14.950.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Blitar, Kec. Ponggok, Semua Kel/Desa	Terselenggarakan 1 Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	14.950.000	
11	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kab. Blitar, Kec. Ponggok, Semua Kel/Desa	Terselenggara 1 nya Urusan Pemerintahan tdk dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan	1	11.550.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kab. Blitar, Kec. Ponggok, Semua Kel/Desa	Terselenggara 1 nya Urusan Pemerintahan tdk dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan	1	11.550.000	
12	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kab. Blitar, Kec. Ponggok, Semua Kel/Desa	Persentase fasilitasi kegiatan Pemberdayaan masyarakat	70%	153.139.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kab. Blitar, Kec. Ponggok, Semua Kel/Desa	Persentase fasilitasi kegiatan Pemberdayaa n masyarakat	70%	153.139.000	

			desa dan kelurahan					desa dan kelurahan			
13	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Blitar, Kec. Ponggok , Semua Kel/Desa	Terkoordinasi ya KegiatanPemb erdayaan Desa	1	153.139.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Blitar, Kec. Ponggok, Semua Kel/Desa	Terkoordinasi ya KegiatanPemb n erdayaan Desa	1	153.139.00	0

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kab. Blitar, Kec. Ponggok, Semua Kel/Desa	Persentase gangguan trantibum yang terselesaikan	80%	19.949.400	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kab. Blitar, Kec. Ponggok, Semua Kel/Desa	Persentase gangguan trantibum yang terselesaikan	80%	19.949.400	
15	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Blitar, Kec. Ponggok, Semua Kel/Desa	Terkoordinasi 1 ya Upaya Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	19.949.400	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Blitar, Kec. Ponggok, Semua Kel/Desa	Terkoordinasi 1 ya Upaya Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	19.949.400	

16	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Blitar, Kec. Ponggok, Semua Kel/Desa	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	70%	157.689.600	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Blitar, Kec. Ponggok, Semua Kel/Desa	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	70%	157.689.600	
17	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Blitar, Kec. Ponggok, Semua Kel/Desa	Terselenggara nya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Kegiatan	157.689.600	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Blitar, Kec. Ponggok, Semua Kel/Desa	Terselenggara nya Urusan Pemerintahan n Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Kegiatan	157.689.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
18	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Blitar, Kec. Ponggok, Semua Kel/Desa	Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa	4 Kegiatan	879.226.194	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Blitar, Kec. Ponggok, Semua Kel/Desa	Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa	4 Kegiatan	879.226.194	
19	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Blitar, Kec. Ponggok, Semua Kel/Desa	Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Pengawasan	10 Kegiatan	879.226.194	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Blitar, Kec. Ponggok, Semua Kel/Desa	Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Pengawasan	4 Kegiatan	879.226.194	

			Pemerintahan Desa					Pemerintahan Desa			
--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--

Blitar, 20 Agustus 2025

CAMAT PONGGOK



DANY MUSAFI KAMIL, S.Sos., MM.

Blitar Pembina Tk. I

NIP. 19800104 200312 1 008

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan prinsip perencanaan partisipatif, penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan yang berasal dari para pemangku kepentingan (stakeholders) merupakan tahapan yang tidak terpisahkan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Bagian ini menyajikan hasil kajian terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk memastikan perencanaan bersifat responsif dan bottom-up.

1. Proses Perolehan Usulan Pemangku Kepentingan

a) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Usulan-usulan program dan kegiatan yang ditelaah dalam dokumen ini diperoleh secara formal melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 tingkat Kecamatan Ponggok. Musrenbang tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari delapan desa di wilayah Kecamatan Ponggok, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, dan unsur lainnya yang daftar hadirnya terlampir dalam Berita Acara hasil kesepakatan. Setiap desa menyampaikan usulan prioritasnya yang kemudian disepakati bersama untuk diteruskan ke tingkat kabupaten.

b) Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar

Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kab. Blitar merupakan instrumen resmi dan sah bagi lembaga legislatif untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun ke dalam proses perencanaan pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh eksekutif (Pemerintah Daerah). Mekanisme ini adalah wujud dari pendekatan perencanaan politis, di mana arah pembangunan daerah juga ditentukan oleh representasi politik masyarakat melalui wakil-wakilnya di DPRD.

Usulan-usulan ini merupakan hasil dari proses reses dan penjangkaran aspirasi yang dilakukan secara berkala oleh para anggota DPRD. Selama masa reses, setiap anggota dewan kembali ke Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing untuk bertatap muka langsung dengan konstituennya. Melalui berbagai forum seperti dialog, musyawarah atau kunjungan langsung, mereka mengumpulkan berbagai masukan, keluhan, dan usulan kebutuhan pembangunan dari masyarakat yang mereka wakili.

Setelah masa reses berakhir, seluruh aspirasi yang terhimpun tersebut kemudian dibawa kembali ke lembaga DPRD, usulan tersebut dibahas, diverifikasi, dan dikompilasi menjadi sebuah dokumen utuh dan

merepresentasikan pandangan kelembagaan DPRD. Dokumen inilah yang disebut Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

Selanjutnya, dokumen Pokir ini secara resmi disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah (Bupati) dalam sebuah Rapat Paripurna. Penyerahan ini merupakan momen penting yang menandai masuknya aspirasi legislatif ke dalam ranah perencanaan eksekutif. Pemerintah Daerah, melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Bappedalitbang, kemudian wajib menelaah dan mengakomodasi usulan-usulan Pokir tersebut untuk diselaraskan dengan prioritas, target, dan kemampuan keuangan daerah.

Sebagai bukti bahwa proses ini telah dilaksanakan sesuai peraturan, usulan-usulan Pokir yang telah disepakati dan terverifikasi kemudian secara resmi diakomodasi dan menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan daerah, yaitu dalam Lampiran I Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2026.

2. Penjelasan Kesesuaian Usulan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Hasil penelaahan menunjukkan bahwa mayoritas usulan prioritas, baik dari Musrenbang maupun Pokir DPRD, bersifat kegiatan pembangunan fisik dan pengadaan sarana prasarana. Secara kewenangan, eksekusi langsung atas kegiatan-kegiatan fisik tersebut berada pada Perangkat Daerah (PD) teknis terkait di tingkat Kabupaten.

Secara kewenangan, eksekusi langsung atas kegiatan-kegiatan fisik tersebut berada pada Perangkat Daerah (PD) teknis terkait di tingkat Kabupaten. Meskipun demikian, seluruh usulan tersebut memiliki kesesuaian dan keterkaitan yang erat dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ponggok sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Peran Kecamatan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 adalah sebagai fasilitator, koordinator, dan pengawas dari usulan-usulan tersebut. Keterkaitan ini diwujudkan melalui berbagai program di Kecamatan :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

Program ini menjadi fondasi bagi pelaksanaan seluruh fungsi fasilitasi dan koordinasi. Anggaran dalam program ini (seperti belanja ATK, perjalanan dinas untuk koordinasi, rapat-rapat, dan honorarium staf) memungkinkan aparatur kecamatan untuk dapat melaksanakan tugasnya dalam mengawal usulan Musrenbang. Tanpa dukungan program penunjang ini, kegiatan fasilitasi dan koordinasi pada program-

program teknis lainnya tidak akan dapat berjalan secara efektif.

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan:

Program ini memiliki keterkaitan paling langsung dengan proses Musrenbang. Sesuai tugas dan fungsinya, Seksi Pemberdayaan Masyarakat berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan dan memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa. Oleh karena itu, seluruh usulan yang muncul dari Musrenbang merupakan output dari fasilitasi yang dilakukan melalui program ini.

3) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa:

Sebelum usulan dibawa ke Musrenbang Kecamatan, usulan tersebut harus masuk dalam dokumen perencanaan desa (RKPDDes). Program ini berperan dalam memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan administrasi tata pemerintahan desa, memastikan bahwa usulan-usulan tersebut memiliki landasan yuridis yang kuat di tingkat desa.

4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum:

Setiap kegiatan pembangunan fisik (seperti pembangunan jembatan atau jalan) berpotensi menimbulkan dinamika sosial di masyarakat. Program ini berperan dalam mengawal dan memantau proses pelaksanaan pembangunan untuk memastikan berjalan dengan lancar, aman, dan tertib, serta memitigasi potensi konflik sosial yang mungkin timbul.

5) Program Penyelenggaraan Pemerintahandan Pelayanan Publik:

Kecamatan akan berperan sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan Perangkat Daerah teknis terkait, serta membantu dalam proses administrasi yang diperlukan untuk merealisasikan usulan tersebut, misalnya dalam hal verifikasi data calon penerima bantuan RTLH.

6) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum:

Usulan seperti "Rehab Tempat Ibadah" sangat relevan dengan program ini, di mana salah satu tugasnya adalah memfasilitasi pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 telah menentukan 5 (empat) prioritas pembangunan daerah yaitu: tujuan pada Tahun 2025 adalah :

1. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan percepatan Pengentasan Kemiskinan;
2. Meningkatkan Kapasitas SDM Pelaku Ekonomi dan Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;

3. Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang;
 4. Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik; dan
 5. Pemantapan Infrastruktur Ekonomi serta Daya Dukung Lingkungan Hidup
3. Kegiatan musyawarah pembangunan ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan top down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya didalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kondisi seperti ini pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha dapat terlibat secara bersama-sama dalam proses pembangunan mulai dari membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil-hasil pembangunan partisipatif yang telah diatur dalam Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP). Berikut adalah usulan Program dan kegiatan dari yang disetujui pada Pra Musrenbang tahun 2024., dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Nama SKPD: Kecamatan Ponggok

N o	Program/Kegiatan Usulan	Lokasi (Desa/Dusun)	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan (Keterangan/Asal Usulan/ OPD Tujuan Awal)
Usulan Hasil Musrenbang Kecamatan					
PP1: PEMERATAAN KONEKTIVITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN & PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP					
1	Pemerataan Konektivitas Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Desa Ringinanyar	Rehabilitasi Jembatan	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Pemerataan Konektivitas Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Desa Maliran	Pemeliharaan Berkala Jalan	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Pemerataan Konektivitas Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Desa Karangbendo	Pemeliharaan Rutin Jalan	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Pemerataan Konektivitas Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Desa Ponggok	Pemeliharaan Berkala Jalan	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Pemerataan Konektivitas Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Desa Bendo	Pembangunan Saluran Drainase	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PP2: PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN & PENGEMBANGAN HILIRISASI PERTANIAN					
6	Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengembangan Hilirisasi Pertanian	Desa Bendo	Pelatihan tentang pembuatan pakan ternak	-	Dinas Peternakan dan Perikanan
7	Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengembangan Hilirisasi Pertanian	Desa Karangbendo	Pelatihan Agribisnis Tanaman Perkebunan	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengembangan Hilirisasi Pertanian	Desa Kebonduren	Pelatihan tentang pembuatan pakan ternak	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Program/Kegiatan Usulan	Lokasi (Desa/Dusun)	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan (Keterangan/Asal Usulan/ OPD Tujuan Awal)
PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN INDUSTRI & UMKM, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF					
9	Pemberdayaan Masyarakat, Penguatan UKM dan Industri, serta Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk Pembangunan Ekonomi	Desa Kebonduren	Pelatihan Produksi Olahan Makanan / Minuman	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
10	Pemberdayaan Masyrkt, Penguatan UKM dan Industri, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk Pembangunan Ekonomi	Desa Langon	Bintek Tata Kelola Pariwisata	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
11	Pemberdayaan Masyarakat, Penguatan UKM dan Industri, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk Pembangunan Ekonomi	Desa Pojok	Bimbingan Teknis Manajerial BUMDes		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PP4: PEMBANGUNAN SDM YANG INKLUSIF & PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF					
12	Pembangunan SDM yang Inklusif dan Perlindungan Sosial yang Adaptif	Desa Dadaplangu	Pelatihan Kapasitas Kader Pemberdayaan Kesehatan	-	Dinas Kesehatan
13	Pembangunan SDM yang Inklusif dan Perlindungan Sosial yang Adaptif	Desa Langon	Pelatihan Kapasitas Kader Pemberdayaan Kesehatan	-	Dinas Kesehatan
14	Pembangunan SDM yang Inklusif dan Perlindungan Sosial yang Adaptif	Desa Pojok	Pelatihan Kapasitas Kader Pemberdayaan Kesehatan	-	Dinas Kesehatan
15	Pembangunan SDM yang Inklusif dan Perlindungan Sosial yang Adaptif	Desa Langon	osialisasi Masyarakat tentang Bahan-Bahan Berbahaya dalam Makanan, Obat Tradisional dan Kosmetik	-	Dinas Kesehatan

16	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Kualitas Pelayanan Publik	Desa Kebonduren	Pembinaan dan Peyuluhan Keamanan dan Ketertiban Umum	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
17	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Kualitas Pelayanan Publik	Desa Langon	Peningkatan kapasitas BPD	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Kualitas Pelayanan Publik	Desa Pojok	Peningkatan kapasitas BPD	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PENA INTAN					
19	Bantuan Sosial Alat Bantu Alat Bantu Dengar (PENA INTAN)	Desa Dadaplangu	Usia Lanjut yang menyebabkan Kekurangan daya pendengaran	-	Dinas Sosial
20	Sosialisasi gizi dan pola makanan sehat (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)	Desa Jatilengger	Kurangnya pemahaman mengenai gizi seimbang	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
21	Bantuan Sosial Tongkat Pemandu Tuna Netra	Desa Pojok	Pemberian alat pemandu tuna netra		Dinas Sosial
22	Pelatihan Pengolahan pangan bergizi untuk ibu rumah tangga	Desa Langon	untuk meningkatkan pengetahuan para IRTa sehingga dapat memberikan makanan bergizi pada keluarganya		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
23	Bimtek Menuju Perwujudan Ramah Perempuan dan Peduli Anak	Desa Jatilengger	Kekerasan terhadap perempuan dan anak		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memasuki tahun 2026, Kecamatan Ponggok berada dalam periode transisi perencanaan strategis. Tahun ini merupakan tahun kedua implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2025- 2029, yang mengusung Visi, Misi, dan arah kebijakan baru dari Kepala Daerah. Oleh karena itu, sesuai amanat peraturan perundangan, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2026 ini harus selaras dengan kerangka perencanaan jangka menengah tersebut, sebagaimana telah dirumuskan dalam Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ponggok Tahun 2025-2029.

Perumusan tujuan dan sasaran baru ini tidak meninggalkan hasil evaluasi dari periode sebelumnya. Sebaliknya, isu-isu strategis dan prioritas tindak lanjut yang telah diidentifikasi dalam Bab II terutama target-target yang belum tercapai pada tahun 2024 tetap menjadi fokus utama dan kini diintegrasikan ke dalam kerangka sasaran yang baru untuk memastikan adanya kesinambungan dan penyelesaian masalah secara tuntas.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Ponggok Tahun 2026 tidak terlepas dari kerangka kebijakan pembangunan yang lebih luas di tingkat nasional maupun provinsi. Telaahan terhadap kebijakan nasional ini bertujuan untuk memastikan adanya sinergi dan keselarasan antara program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat kecamatan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2026, terdapat beberapa agenda dan prioritas pembangunan nasional yang relevan dan harus didukung oleh penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ponggok, antara lain :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Prioritas nasional ini mencakup upaya percepatan penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

a. Keterkaitan dengan Kecamatan Ponggok

Kecamatan Ponggok secara langsung mendukung prioritas ini melalui program-program yang dikoordinasikan oleh Seksi Kesejahteraan Sosial dan PMD terkait penanganan Stunting lintas sektoral, implementasi nyata dari kebijakan nasional di tingkat lokal.

2. Transformasi ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Kebijakan ini menekankan pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penguatan kelembagaan ekonomi di tingkat desa.

a. Keterkaitan dengan Kecamatan Ponggok:

Kecamatan Ponggok berkontribusi melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, yang salah satu fokusnya adalah pendampingan dan fasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

3. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Agenda nasional ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

a. Keterkaitan dengan Kecamatan Ponggok:

Kecamatan Ponggok menjawab agenda ini melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebagai salah satu bentuk dukungan nyata terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, isu terkait rendahnya capaian SAKIP menjadi catatan bahwa aspek akuntabilitas dalam reformasi birokrasi masih perlu menjadi fokus perbaikan.

Dengan demikian, program dan kegiatan yang akan dirumuskan dalam Renja PD Kecamatan Ponggok Tahun 2026 telah diarahkan untuk mendukung dan menyukseskan pencapaian prioritas-prioritas pembangunan nasional tersebut.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Ponggok Tahun 2026 didasarkan pada hasil analisis dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya serta diselaraskan dengan sasaran strategis jangka menengah yang baru. Berdasarkan isu-isu penting yang telah diidentifikasi pada Bab II, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Renja PD untuk tahun 2026 yang mengacu pada Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ponggok Tahun 2025-2029.

Tujuan Renja PD Tahun 2026

Sesuai dengan Tujuan Renstra 2025-2029, tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2026 adalah:

1. Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik.

Indikator Tujuan

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai).

Sasaran Renja PD Tahun 2026: Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan menjadi fokus pada tahun 2026:

a) Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan

Indikator Sasaran

Persentase Desa Mandiri (90%).

Sasaran ini ditetapkan untuk menindaklanjuti dan meningkatkan program pembinaan dan pemberdayaan desa yang telah berjalan, dengan fokus untuk mendorong desa naik status dari berkembang menjadi mandiri. Pada Sasaran ini secara langsung menindaklanjuti isu strategis belum tercapainya target "Persentase Bumdes Berkembang". Upaya peningkatan kapasitas BUMDes kini menjadi sub-strategi fundamental untuk membangun pilar ketahanan ekonomi desa, yang merupakan syarat untuk mencapai status Desa Mandiri.

b) Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

Indikator Sasaran

Persentase pelanggaran trantibum di kecamatan yang ditindak lanjuti.

Sasaran ini merupakan kelanjutan dari kinerja baik pada tahun sebelumnya dalam menjaga stabilitas wilayah, dengan tolok ukur yang lebih spesifik pada penurunan angka kriminalitas dan situasi yang kondusif. Sasaran ini merupakan keberlanjutan dan penguatan dari kinerja baik yang telah dicapai pada tahun 2024 dalam menjaga stabilitas wilayah, dengan tolok ukur yang lebih tajam dan berorientasi pada dampak (outcome).

c) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD

Indikator Sasaran:

SKOR SAKIP (Nilai)

Sasaran ini secara eksplisit meneruskan prioritas tindak lanjut dari isu strategis utama tahun 2024, yaitu tidak tercapainya target Nilai SAKIP. Ini menunjukkan komitmen kuat untuk melakukan perbaikan fundamental pada sistem manajemen kinerja internal.

d) Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa.

Indikator sasaran

Persentase desa yang memiliki administrasi baik, Persentase desa mandiri di kecamatan dan Jumlah keeksisan Bumdes.

Sasaran ini merupakan kelanjutan dari kinerja baik pada tahun sebelumnya dalam menjaga pelayanan di tingkat pemerintahan desa. Sasaran ini merupakan keberlanjutan dan penguatan dari kinerja baik yang telah dicapai pada tahun 2024 dalam upaya pelayanan di tingkat pemerintahan desa serta meningkatkan ekonomi di tingkat desa, dengan tolok ukur yang lebih tajam dan berorientasi pada dampak (outcome)

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada sub-bab sebelumnya, maka dirumuskanlah serangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ponggok pada Tahun Anggaran 2026. Sebagai wujud adaptasi terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah yang baru dan amanat dari Rancangan Awal Renstra 2025-2029, pada Rencana Kerja Tahun 2026 ini terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan baru yang dirancang secara spesifik untuk mengakselerasi pencapaian sasaran-sasaran strategis yang baru. Rincian mengenai latar belakang dan tujuan dari kegiatan baru tersebut diuraikan lebih lanjut pada Bab IV.

1. Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Perumusan program dan kegiatan ini didasarkan pada beberapa faktor pertimbangan strategis untuk memastikan relevansi dan dampaknya, antara lain:
 - a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah: Seluruh program dan kegiatan dirancang sebagai penjabaran tahunan dari Draft Rancangan Awal Renstra 2025-2029, yang bertujuan untuk mendukung pencapaian Visi “KABUPATEN BLITAR BERDAYA DAN BERJAYA” dan Misi-Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029.
 - b. Dukungan terhadap Prioritas Nasional dan Daerah: Program dirancang untuk selaras dengan prioritas nasional dan daerah, seperti:
 - 1) Penanganan Stunting dan Peningkatan Ketahanan Pangan: Diwujudkan melalui sub kegiatan baru yaitu Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga yang menargetkan tiap desa.
 - 2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Diakomodasi melalui sub kegiatan baru Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan.

- 3) Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Pelayanan: Diterjemahkan dalam sub kegiatan baru Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah.
 - c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja: Perumusan kegiatan juga merupakan respons langsung terhadap hasil evaluasi kinerja tahun 2024 (sebagaimana dianalisis di Bab II), terutama untuk menindaklanjuti target-target yang belum tercapai seperti peningkatan Skor SAKIP Persentase desa yang memiliki administrasi baik, Persentase desa mandiri di kecamatan dan Jumlah keeksan Bumdes.
2. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan Secara keseluruhan, Rencana Kerja Kecamatan Ponggok Tahun 2026 terdiri dari 6 Program, 15 Kegiatan, dan 32 Sub Kegiatan.
- a) Sifat Penyebaran Lokasi: Sifat penyebaran lokasi kegiatan bervariasi. Sebagian besar kegiatan yang bersifat administratif, koordinatif, dan pembinaan (seperti fasilitasi penyusunan peraturan desa) tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Ponggok untuk menjamin pemerataan. Namun, terdapat pula kegiatan yang terfokus pada kelompok sasaran tertentu, seperti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga yang akan menyasar 15 desa di lokasi yang telah ditentukan.
 - b) Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif: Total kebutuhan dana atau pagu indikatif untuk pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Kecamatan Ponggok pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 3.136.106.443. Sumber pendanaan untuk seluruh kegiatan ini berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU).
3. Penjelasan Kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rumusan 6 program dalam Renja PD ini telah selaras dengan program- program yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2026 (Perbup No. 73 Tahun 2025). Namun, rincian kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan, terutama yang bersifat baru seperti Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, merupakan hasil dari analisis kebutuhan spesifik Kecamatan Ponggok. Usulan-usulan baru ini tidak dirinci dalam dokumen RKPD yang bersifat makro, namun sangat esensial untuk menerjemahkan arah kebijakan baru dari Renstra 2025-2029 dan menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja perangkat daerah.

4. Tabel Rencana Program dan Kegiatan Rincian lengkap mengenai rumusan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Target, Lokasi, Pagu Indikatif, serta Prakiraan Maju untuk tahun 2027 disajikan dalam tabel di bawah ini:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN PONGGOK KAB. BLITAR
TAHU 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHI R PERIO DE RENS TRA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARG ET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAE RAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		KECAMATAN PONGGOK						3.136.106.443,00							6.020.478.165,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.136.106.443,00							6.020.478.165,00			
	7.01	KECAMATAN						3.136.106.443,00							6.020.478.165,00			
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.899.602.249,00						-	2.415.069.900,00			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	4.244.584,00			-	-	-	-	4.950.000,00	KECAMATAN PONGGOK		
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	3.244.684,00	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	-	-	-		3.850.000,00	KECAMATAN PONGGOK		
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan				5 Laporan	999.900,00	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	-	-	-		1.100.000,00	KECAMATAN PONGGOK		

			<i>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>													
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.562.974.549,00			-	-	-	-	1.985.794.900,00	KECAMATAN PONGGOK
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				11 Orang/bulan	1.536.989.049,00	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.950.794.900,00	KECAMATAN PONGGOK
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				24 Dokumen	20.985.500,00	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN PONGGOK
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			0				50	5.000.000,00	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN PONGGOK
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	9.930.000,00			-	-	-	-	11.000.000,00	KECAMATAN PONGGOK
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			0				120	9.930.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.000.000,00	KECAMATAN PONGGOK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHI R PERIO DE RENS TRA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	108.973.584,00			-	-	-	-	120.450.000,00	KECAMATAN PONGGOK
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	10.494.700,00	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	-	-	-		11.550.000,00	KECAMATAN PONGGOK
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	39.999.884,00	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	-	-	-		44.000.000,00	KECAMATAN PONGGOK
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			0				6 0	8.499.100,00	-	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	-	-	-		9.350.000,00	KECAMATAN PONGGOK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	16.500.000,00	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	-	-	-		18.150.000,00	KECAMATAN PONGGOK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				300 Paket	16.999.900,00	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	-	-	-		18.700.000,00	KECAMATAN PONGGOK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				150 Laporan	16.480.000,00	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	-	-	-		18.700.000,00	KECAMATAN PONGGOK
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	14.155.800,00			-	-	-	-	32.450.000,00	KECAMATAN PONGGOK
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				25 Unit	0,00	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	-	-	-		15.950.000,00	KECAMATAN PONGGOK
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				4 Unit	14.155.800,00	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	-	-	-		16.500.000,00	KECAMATAN PONGGOK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	134.266.632,00			-	-	-	-	157.300.000,00	KECAMATAN PONGGOK
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHI R PERIO DE RENS TRA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOK ASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NA SIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400 Laporan	3.840.000,00	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	-	-	-		8.250.000,00	KECAMATAN PONGGOK
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			0				36 0	13.335.000,00	-	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	-	-	-		18.700.000,00	KECAMATAN PONGGOK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	117.091.632,00	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	-	-	-		130.350.000,00	KECAMATAN PONGGOK
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	65.057.100,00			-	-	-	-	103.125.000,00	KECAMATAN PONGGOK
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	28.612.100,00	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	-	-	-		31.625.000,00	KECAMATAN PONGGOK
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	6.450.000,00	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	-	-	-		38.500.000,00	KECAMATAN PONGGOK

	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	29.995.000,00	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		33.000.000,00	KECAMATAN PONGGOK
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	26.500.000,00						-	92.562.500,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	14.950.000,00			-	-	-	-	52.000.000,00	KECAMATAN PONGGOK
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				50 Laporan	14.950.000,00	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		52.000.000,00	KECAMATAN PONGGOK
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	11.550.000,00			-	-	-	-	40.562.500,00	KECAMATAN PONGGOK
3.	7.01.02.2.02.0003 7.01.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan -	-									-			PAGU INDIKATIF (Rp)
							370 Lapo ran	11.550.000,00 153.139.000,00	Kab. Blitar, Ponggok, Semu a Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			-		
							-									

	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	153.139.000,00			-	-	-	15	16	17
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				18 Lembaga Kemasyarakatan	153.139.000,00	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.562.500,00	KECAMATAN PONGGOK
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	19.949.400,00						-	289.377.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	19.949.400,00			-	-	-	-	289.377.000,00	KECAMATAN PONGGOK
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>				30 Laporan	19.949.400,00	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		289.377.000,00	KECAMATAN PONGGOK
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	157.689.600,00						-	144.182.500,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	157.689.600,00			-	-	-	-	144.182.500,00	KECAMATAN PONGGOK
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														

			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa</i>				4 Orang	157.689.600,00	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		144.182.500,00	KECAMATAN PONGGOK
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	879.226.194,00						-	246.867.500,00	
														-	246.867.500,00	KECAMATAN PONGGOK
															246.867.500,00	KECAMATAN PONGGOK
														-	2.832.418.765,00	

	7.01.06.2.01 7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	- <i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	-				-				879.226.194,00 -		104.500.000,00	KECAMATAN PONGGOK
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>				15 Dokumen	19.650.000,00	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	24.420.000,00	KECAMATAN PONGGOK
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>				30 Dokumen	5.760.000,00	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	27.500.000,00	KECAMATAN PONGGOK
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa													
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>				3 Dokumen	819.117.394,00	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP5: PENINGKATAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	-	2.675.998.765,00	KECAMATAN PONGGOK
J U M L A H								3.136.106.443,00						6.020.478.165,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Ponggok untuk Tahun Anggaran 2026. Uraian pada bab ini merupakan penjabaran yang lebih detail dari rumusan rencana program dan kegiatan yang telah disajikan pada Bab III, dan sepenuhnya selaras dengan data final yang telah diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana tercantum dalam dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Ponggok Tahun 2026. Total alokasi pagu indikatif untuk pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Kecamatan Ponggok pada tahun 2026 adalah sebesar 3.136.106.443. Alokasi dana tersebut didistribusikan ke dalam 6 (enam) program utama. Berikut adalah rincian penjabarannya:

4.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Pagu Anggaran Program Rp 1.899.602.249.

Program ini menjadi fondasi operasional bagi seluruh penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Secara strategis, program ini akan diarahkan untuk mendukung pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan Indikator Sasaran: Skor SAKIP, dengan target Nilai/ Skor 68

b. Rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan :

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Pagu: Rp 4.244.564)

a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Indikator: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Target : 12 Dokumen.

Pagu: Rp 3.244.684.

b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Indikator : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD.

Target : 5 Dokumen.

Pagu : Rp 999.900.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah Pagu: Rp 1.562.974.549

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Indikator: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.

Target: 11 Orang/ Bulan

Pagu: Rp 1.536.989.049.

- b) Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.

Indikator: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.

Target: 24 Dokumen.

Pagu: Rp 20.985.500,00.

- c) Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD.

Indikator : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.

Target: 5 Dokumen.

Pagu: Rp 5.000.000.

- 3) Kegiatan Kepegawian Perangkat Daerah

Pagu: Rp 9.930.000.

- a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Indikator: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan ASN.

Target: 12 Orang

Pagu: Rp 9.930.000.

- 4) Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat

Daerah Pagu: Rp 108.973.584.

- a) Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.

Indikator: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan.

Target: 6 Paket.

Pagu: Rp 10.494.700.

- b) Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Indikator: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.

Target: 6 Paket.

- Pagu: Rp 39.999.884.
- c) Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
Indikator: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan.
Target: 6 Paket.
Pagu: Rp 8.499.100
- d) Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
Indikator: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan.
Target: 5 Paket.
Pagu: Rp 16.500.000
- e) Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Indikator: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan.
Target: 30 Paket.
Pagu: Rp 16.999.900
- f) Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Indikator: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Target: 15 Laporan.
Pagu: Rp 16.480.000.
- 5) Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pagu: Rp 14.155.800.
- a) Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel.
Indikator: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan.
Target: 1 Unit.
Pagu: Rp 0.
- b) Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
Indikator: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.
Target: 4 Unit.
Pagu: Rp 14.155.800.
- 6) Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pagu: Rp 134.266.632.
- a) Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat yang Disediakan.

Target: 12 laporan.

Pagu: Rp 3.840.000.

- b) Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.

Target: 36 paket.

Pagu: Rp 13.335.000.

- c) Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan.

Target: 12 Laporan.

Pagu: Rp 117.091.632.

- 7) Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu: Rp 65.057.100.

- a) Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Indikator: Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya.

Target: 12 unit.

Pagu: Rp 28.612.100.

- b) Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Indikator: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara. Target: 22 Unit.

Pagu: Rp 6.450.000.

- c) Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Indikator: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi.

Target: 2 Unit.

Pagu: Rp 29.995.000.

4.2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

a. Pagu Anggaran Program Rp 26.500.000.

Program ini secara langsung bertujuan untuk mendukung Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD, dengan Indikator Sasaran: Skor SAKIP, dengan target Nilai/ Skor 68.

Rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan:

1) Kegiatan: Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Pagu: Rp 14.950.000.

d) Sub Kegiatan: Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.

Indikator: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.

Target: 50 Laporan.

Pagu: Rp 14.950.000.

2) Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Pagu: Rp 11.550.000.

a) Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Indikator: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Target: 30 Laporan.

Pagu: Rp 11.550.000.

4.3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

c. Pagu Anggaran Program Rp 153.139.000.

Program ini secara spesifik dirancang untuk mendukung pencapaian Sasaran: Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan, dengan indikator sasaran Persentase Desa Mandiri, dengan target 37,5%.

Rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan:

1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Pagu Rp 153.139.000.

- a) Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
Indikator: Jumlah Laporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. Target: 12 Laporan.
Pagu: Rp 153.139.000.

4.4 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- d. Pagu Anggaran Program: Rp 879.226.194.

Program ini juga berkontribusi langsung pada pencapaian

Sasaran: Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan, dengan indikator sasaran Persentase Desa Mandiri, dengan target 37.5%.

Rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan:

- 1) Kegiatan: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Pagu: Rp 879.226.194.
 - a) Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
Indikator: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
Target: 30 Dokumen.
Pagu: Rp 34.698.800.
 - b) Sub Kegiatan: Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa. Indikator: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
Target: 15 Dokumen.
Pagu: Rp 19.650.000.
 - c) Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.
Indikator : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.
Target: 30 Dokumen.
Pagu: Rp 5.760.000.
 - d) Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Indikator: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Target: 3 Dokumen.

Pagu: Rp 819.117.394.

4.5 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

e. Pagu Anggaran Program: Rp 16.949.400.

Program ini bertujuan untuk mencapai Sasaran: Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, dengan indikator sasaran Menurunnya Angka Kriminalitas di Kecamatan.

Rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan:

- 1) Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Pagu : 16.949.400.

- a) Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Indikator : Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Target: 30 Laporan.

Pagu: Rp 16.949.400.

4.6 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

f. Pagu Anggaran Program: Rp 157.689.600.

Program ini mendukung pencapaian Sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, dengan Indikator Sasaran Menurunnya Angka Kriminalitas di Kecamatan.

Rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan:

- 1) Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Pagu: Rp 149.806.200.

- a) Sub Kegiatan: Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Indikator: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

Target : 300 Orang.

Pagu : Rp 149.806.200.

BAB V

PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan rekomendasi sebagai penutup dokumen Rancangan Akhir Renja PD Kecamatan Ponggok Tahun 2026. Di dalamnya diuraikan catatan-catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut untuk memastikan implementasi Renja PD ini dapat berjalan dengan efektif dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

5.1 Catatan Penting

Berdasarkan seluruh proses penyusunan yang telah dilakukan, terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026:

1) **Prioritas Peningkatan Akuntabilitas Kinerja**

Isu tidak tercapainya target Nilai SAKIP merupakan tantangan paling signifikan. Seluruh jajaran pimpinan dan staf di Kecamatan Ponggok harus memberikan perhatian khusus dan komitmen penuh untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan memperbaiki sistem manajemen kinerja internal.

2) **Penguatan Budaya Inovasi**

Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi diharapkan menjadi pemicu untuk terus menumbuhkan budaya inovasi di seluruh lini pelayanan. Pelaksanaan Rencana Kerja 2026 harus senantiasa membuka ruang bagi gagasan-gagasan baru untuk menjawab tantangan dan dinamika kebutuhan masyarakat.

3) **Fleksibilitas Anggaran**

Pelaksanaan Rencana Kerja ini harus senantiasa memperhatikan dinamika ketersediaan anggaran daerah. Jika terjadi perubahan atau rasionalisasi anggaran, maka prioritas akan diberikan pada kegiatan yang berdampak langsung pada pencapaian Indikator Kinerja Sasaran utama dan pelayanan dasar kepada masyarakat.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah Pelaksanaan Implementasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ponggok Tahun 2026 akan berpegang pada kaidah-kaidah sebagai berikut:

1) Akuntabilitas

Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara fisik, keuangan, maupun manfaatnya. Prinsip akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban yang jelas atas setiap tindakan dan kebijakan yang diambil. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya dari sisi administrasi keuangan (bebas dari penyimpangan), tetapi juga dari sisi capaian fisik (output) dan dampak yang dihasilkan (outcome/manfaat) bagi masyarakat..

2) Transparansi

Pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara transparan dan terbuka bagi pengawasan internal maupun eksternal. Pelaksanaan seluruh kegiatan harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan. Hal ini berarti bahwa informasi yang relevan mengenai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan harus dapat diakses dengan mudah oleh para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Transparansi akan diwujudkan melalui publikasi informasi melalui berbagai media yang tersedia serta sikap proaktif dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat dan lembaga pengawas, sehingga membuka ruang bagi pengawasan publik dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

3) Efisiensi dan Efektivitas

Penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, waktu) harus dilakukan secara efisien untuk mencapai hasil yang efektif dan berdaya guna maksimal. Prinsip ini menekankan bahwa setiap penggunaan sumber daya baik itu anggaran, sumber daya manusia (SDM), maupun waktu -harus dilakukan secara efisien untuk mencapai hasil yang efektif dan berdaya guna maksimal. Efisiensi berarti mencapai keluaran (output) yang maksimal dengan masukan (input) yang minimal, tanpa mengurangi kualitas..

4) Partisipasi

Pelaksanaan kegiatan, terutama yang bersifat pembinaan dan pemberdayaan, harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Pelaksanaan kegiatan,

terutama yang bersifat pembinaan, pemberdayaan, dan pelayanan, harus senantiasa membuka ruang dan mendorong keterlibatan aktif dari masyarakat serta pemangku kepentingan terkait. Partisipasi tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran fisik dalam kegiatan, tetapi juga sebagai keterlibatan dalam memberikan masukan, melaksanakan, serta ikut mengawasi jalannya program.

5) Sinergi dan Koordinasi

Pelaksanaan tugas dan fungsi harus senantiasa mengedepankan sinergi dan koordinasi, baik secara internal antar seksi maupun secara eksternal dengan Perangkat Daerah lain, Pemerintah Desa, dan unsur Forkopimcam. Pelaksanaan tugas dan fungsi tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral, Pemerintah Desa, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) seperti Polsek dan Koramil. Dengan sinergi yang kuat, berbagai sumber daya dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan bersama secara lebih efektif.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut Setelah ditetapkan dokumen Rancangan Akhir Renja PD Kecamatan Ponggok Tahun 2026 ini, langkah-langkah selanjutnya yang akan ditempuh adalah :

- 1) Dokumen Renja PD pedoman bagi Kecamatan Ponggok dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk Tahun Anggaran 2026 dan ada sinergitas terhadap Renstra 2025-2029 serta menjadi acuan pelaksanaan kegiatan kecamatan Ponggok tahun 2026.
- 2) Camat akan melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi menyeleluruh kepada seluruh jajaran aparatur Kecamatan Ponggok untuk memastikan pemahaman yang sama terhadap tujuan, sasaran, dan target serta capaian yang harus dipenuhi.
- 3) Seluruh program dan kegiatan dan sub kegiatan akan dimonitor dan dievaluasi secara berkala (bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan) melalui rapat staf rutin pada tahun 2026.

- 4) Hasil Renja PD Tahun 2026 ini akan menjadi bahan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2026 dan menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya.

Ponggok, 20 Agustus 2025
CAMAT PONGGOK



DANY MUSAFI KAMIL, S.Sos., MM.

Pembina Tk. I
NIP. 19800104 200312 1 008